

**IDENTITAS NASIONAL DAN IDENTITAS ETNIS
MAHASISWA DI ASRAMA BERBASIS KESUKUAN DI
INDONESIA**

**(Studi Kasus terhadap Mahasiswa di Asrama Berbasis Suku
Kedaerahan Riau, Makasar, dan Irian Jaya di DIY)**

Oleh:
Suharno
Staf Pengajar FISE UNY

Abstract

This study aims at exploring some problems; first, exploring the depiction of students' identity of Riau, Makasar, and Irian Jaya, how far their national awareness; second, understanding factors causing the emergence of their identity; third, offering long term solution in effort to perpetuate cultural values to them, especially to those in tribe-based dormitory who hold the value of difference in unity; fourth, in state level, offering a long term solution in effort to handle ethnic-based conflicts.

Techniques for data collection are 1) interview, 2) documentation, are 3) observation. The population of this research is students in tribe-based dormitory of Riau, Makasar, and Irian Jaya. To determine the subject, researcher used purposive sampling; those enrolling as organizers of the dormitory (chairman, secretary, treasurer, public relation, and security). In addition, the data analysis technique used is inductive analysis.

The findings are 1) high national awareness of the students, 2) relatively high ethnic identity of the students. National and ethnic identity of students of Makasar are little higher than the others, 3) factors influencing the strengthening of ethnic identity are same historical background in struggling against the colonialists, heroism, external threat, 4) factors influencing the strengthening of ethnic identity are ethnic patriotism, feeling of the same destiny, the attention of the native-local government, and the togetherness among the students, 5) the formulations to overcome ethnic conflict are involving ethnic figures in solving problems, bottom up solving problem, paying attention and giving space to the difference of the parties involving in conflict.

Keywords: national identity, ethnic identity, ethnic conflict.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Indonesia di masa depan tentunya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Ada sejumlah alasan yang dapat digunakan guna mendukung kebenaran pernyataan tersebut. *Pertama*, seiring dengan era kapitalisme global, jargon yang muncul ke permukaan adalah demokratisasi politik. Pada tataran tertentu demokratisasi politik identik dengan kepemimpinan sipil. Terciptanya kepemimpinan sipil seperti yang diharapkan dari gagasan masyarakat madani, ternyata tidaklah mudah. Beberapa prasyarat seperti kesiapan mental dalam menerima nilai-nilai demokrasi seperti egalitarianisme, *entrepreneurship* dan kebebasan (McDosky & Zalter, 1998) haruslah dilewati.

Kedua, selain berusaha mengurangi kepemimpinan militeristik, penting pula dilakukan upaya persiapan secara internal di kalangan sipil itu sendiri. Selama ini kepemimpinan sipil seperti tampak pada diri Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir dan para *founding fathers* selalu datang dari lingkungan perguruan tinggi. Itu berarti potensi kepemimpinan masa depan ada di tangan mahasiswa. Akan tetapi untuk konteks Indonesia sebelum nilai-nilai demokrasi di atas ditanamkan, tampaknya ada persoalan lain yang lebih serius yang harus dipikirkan, yaitu persoalan kebhinekaan suku bangsa. Persoalan kebhinekaan ini yang oleh para *founding fathers* telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, rupanya pada tingkat implementasi, khususnya di zaman rezim orde baru, telah memunculkan dominasi tertentu (Jawa) atas budaya lain (non-Jawa).

Sebagai reaksi umpan balik muncullah berbagai gerakan separatis atas eksistensi mereka. Memang gerakan separatis itu seperti munculkan seiring dengan bergelornya demokratisasi yang hingar-bingar berbarengan dengan reformasi sejak tahun 1998. Pada masa orde baru gerakan separatis ini sebenarnya telah bergerak secara laten, hanya saja pemberitaannya tidak seterbuka

seperti era reformasi sekarang. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada persoalan integrasi nasional pada zaman orde baru.

Sebagai sebuah negara yang menurut Skinner (1959: 24) terdiri atas 300 suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda, Indonesia memiliki tugas yang berat dalam menjaga integrasi di dalam dirinya. Persoalan integrasi ini diperumit lagi dengan keadaan geografis yang membagi Indonesia atas ± 3000 pulau yang terpencar di suatu daerah *equator* sepanjang ± 3000 mil dari Timur ke Barat dan lebih dari 1000 mil dari Utara ke Selatan. Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari menyebabkan penduduk yang tinggal di setiap pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap kesatuan suku bangsa yang terisolasi terdiri atas sejumlah orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan emosional serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri dengan perkecualian yang sangat kecil.

Pluralitas suku bangsa di atas diperoleh dari fakta sejarah yang mencatat bahwa masing-masing suku bangsa di atas berada di dalam kuasa kerajaan-kerajaan dalam jumlah banyak. Kemudian satu demi satu kerajaan itu runtuh, karena adanya penjajahan dari bangsa-bangsa Eropa. Pengalaman berabad-abad di bawah tekanan kaum penjajah itu telah mendorong munculnya solidaritas, tekad, dan tujuan bersama dari belenggu penjajahan.

Dengan kepeloporan mahasiswa selaku kaum muda terpelajar, semangat kebangsaan digelorakan dan mencapai puncaknya dengan munculnya kesadaran nasional pada diri mahasiswa. Mahasiswa berusaha menghindari semangat kesukubangsaan dan membangun semangat kebangsaan, yaitu ke-Indonesiaan. Semangat itu dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 1928. Dalam sejarah, momentum tersebut merupakan salah satu tonggak perjuangan yang semangatnya terus bertahan hingga Proklamasi Kemerdekaan dan sampai sekarang masih terus diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda.

Kepeloporan mahasiswa seperti tercatat dalam kenyataan sejarah di atas sangat penting direfleksikan kembali. Betapa tidak, mahasiswa adalah kaum muda terpelajar yang terlahir dari lingkungan kental dengan semangat kesukubangsaan, yaitu lingkungan elit tradisional. Di samping itu, mahasiswa adalah produk sebuah Sistem Pendidikan Tinggi yang dipersiapkan untuk menjadi penopang sistem kekuasaan kolonial. Maka dengan kepeloporan tersebut, mahasiswa bukan saja mampu melepaskan diri dari perangkat sistem pendidikan nasional, tetapi lebih dari itu, mahasiswa telah berperan besar dalam menciptakan pandangan *nation state* yaitu ke-Indonesiaan yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas kesukubangsaan.

Menurut Benedict Anderson (1991) ikatan kebangsaan yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas kesukubangsaan sesungguhnya merupakan komunitas yang diimajinasikan. Disebut komunitas, karena dipahami sebagai perserikatan yang dalam dan horisontal yang di dalamnya terdapat hubungan persaudaraan di antara para anggotanya. Dikatakan yang diimajinasikan karena antara anggotanya sebagian besar tidak terjalin hubungan tatap muka seperti pada komunitas dalam pengertian yang sebenarnya. Menurut Anderson, ketika *interest* etnis tidak dapat terpenuhi oleh *interest* nasional atau sebaliknya, maka yang terjadi adalah hubungan yang tidak seimbang dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali kekerasan.

Apa yang dinyatakan Anderson agaknya relevan ketika digunakan untuk melihat perkembangan sosial politik Indonesia sejak tahun 1998 yang sarat diwanai dengan kekerasan. Dalam berbagai konflik seperti Aceh, Timor-Timur (ketika belum terpisah dari Indonesia), Maluku, Sampit, Palangkaraya, dan Irian Jaya, tampak jelas bahwa semangat keetnisan kembali menguat dan memainkan peranan yang sangat penting. Indikasinya tampak dari munculnya aksi-aksi kekerasan yang mengakibatkan terjadinya eksodus etnis pendatang dari daerah-daerah konflik tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan dapat turut berperan di dalam meredakan konflik etnis. Namun harapan itu tampaknya terlalu berlebihan, sebab untuk kondisi sekarang mahasiswa cenderung bergerak ke *perifed*. Gerakan itu tampaknya terpecah ke dalam dua pola. Di satu sisi, gerakan itu mengarah ke pola mahasiswa yang duduk manis dan bersifat elitis. Dalam pola ini mahasiswa cenderung memikirkan urusannya sendiri dan tidak terpikirkan dalam dirinya urusan yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Di sisi lain, gerakan itu mengarah ke penguatan identitas etnis. Dalam pola kedua ini, mahasiswa cenderung terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum separatis dalam melakukan pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu tampak dari keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemisahan Timor-Timur dari NKRI, gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Riau Berdaulat, Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bukan tidak mungkin gerakan mahasiswa dalam pola kedua di atas terus bergerak secara laten dalam berbagai gerakan yang berlangsung di daerah-daerah yang mendasarkan pada ikatan kesukuan.

Sehubungan dengan pola gerakan mahasiswa kedua di atas, yang nyata-nyata tampak dan mendapat legalitas dari pemerintah adalah berdirinya berbagai asrama mahasiswa berbasis suku, seperti asrama mahasiswa Aceh, asrama mahasiswa Riau, asrama mahasiswa Makassar, dan sebagainya di kota-kota pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pemantauan selintas, bahkan antar asrama mahasiswa yang datang dari daerah yang sama juga menjalin hubungan koordinatif dengan asrama mahasiswa dari suku atau daerah yang sama yang berada di kota yang berbeda. Karena adanya hubungan koordinatif itu, asrama-asrama yang masing-masing di kota itu tampak kecil sesungguhnya adalah besar.

Memang sifat kesukubangsaan yang tampak dari asrama-asrama tersebut hanya bersifat simbolis. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa yang simbolis itu tidak memiliki pengaruh apapun. Berdirinya berbagai asrama mahasiswa berbasis suku di atas, akan memunculkan akibat negatif. Kecenderungan seperti itu paling tidak memunculkan kesan bahwa mahasiswa hanya pindah tempat tinggal dari kota asal ke kota tempat mengenyam pendidikan. Mahasiswa tidak mengenyam pendidikan dalam arti kata sesungguhnya: mengembangkan potensi diri, baik dalam pengertian kemampuan intelektual, emosional maupun pengayaan wawasan, baik dalam hal wawasan lokalitas, nasionalisme maupun globalitas.

Akibatnya yang tumbuh dalam diri mahasiswa adalah primordialitas kesukubangsaannya sendiri. Menurut kesadarannya, kebudayaan suku miliknya sajalah yang paling baik dan benar, karenanya harus dijaga baik-baik. Pada kelanjutannya akan muncul penilaian yang sangat ekstrim: kebudayaan di luar sukunya harus diberangus. Dalam wilayah politik, ekspresi semacam itu tampak dari upaya pemisahan diri dari NKRI. Hal seperti itu tentu tidak kondusif bagi tumbuhnya identitas nasional dalam bingkai bhineka tunggal ika.

Oleh karena itu, upaya menumbuhkan kesadaran identitas nasional di kalangan mahasiswa tampaknya perlu dilakukan semenjak dini. Internalisasi nilai-nilai kenasionalan merupakan langkah-langkah yang tampaknya paling urgen untuk dilakukan. Hal itu mengingatkan mahasiswa yang datang dari suku bangsa tertentu setelah lulus biasanya pulang ke daerahnya, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi pemimpin di daerahnya. Tumbuhnya jiwa nasionalisme dalam diri mahasiswa tentu akan sangat mendukung bagi tumbuhnya jiwa nasionalisme masyarakat asal mahasiswa tersebut. Di satu pihak, dalam diri mahasiswa tertanam etos intelektual, di sisi lain dalam diri mahasiswa tertanam jiwa nasionalisme (Umar Kayam, 1989: 364-371).

Penelitian ini ingin melihat tentang seberapa jauh kesadaran identitas nasional dan identitas etnis tertanam dalam diri mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penguatan identitas nasional dan identitas etnis mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku. Kemudian bagaimanakah solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan konflik etnis tersebut.

Cara Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Adapun data penelitian diperoleh melalui wawancara pada para informan. Selain itu data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku/kedaerahan Riau, Makasar, dan Irian Jaya. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yakni para pengurus asrama mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif.

PEMBAHASAN

Negara dan Proses Integrasi Bangsa

Suatu negara yang terdiri atas beragam suku bangsa yang kemudian dikenal dengan nama *nation state* akan berupaya keras untuk memahami keberagaman itu, tetapi sekaligus berupaya menaungi seluruh suku bangsa. Dalam konteks Indonesia, hal yang seperti itu terangkum dalam konsep bhineka tunggal ika. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing suku bangsa di satu sisi dapat mengembangkan potensi dirinya, di sisi lain antara suku bangsa yang satu dengan yang lain dapat bekerja sama dalam rangka meraih tujuan bersama yang lebih besar.

Bangsa menurut Benedict Anderson (1991) dipahami sebagai komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political*

community) dalam batas wilayah yang jelas dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara terbatas, karena bangsa yang paling besar sekalipun mempunyai kekuasaan atas wilayah itu. Akhirnya disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena sekalipun tidak terjadi hubungan tatap muka, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Oleh karena itu, pengertian suatu bangsa merupakan suatu identitas kolektif yang mendefinisikan "kita" yang di satu pihak mengandung jaringan solidaritas, dan di lain pihak mengandung pengakuan sebagai suatu kolektivitas yang berbeda dari "mereka" atau bangsa lain. Ke-kita-an itu diungkapkan melalui simbolisme yang kuat sebagaimana sejarah resmi yang memitoskan ke-kita-an di masa lalu.

Proses terbentuknya suatu negara modern yang penduduknya terikat ke dalam satu bangsa disebut proses pembentukan *nation state*. Pengertian *nation state* mencakup bangsa dengan jumlah kelompok masyarakat (seperti suku bangsa) yang lebih banyak dari bangsa yang hanya memiliki satu suku bangsa. Selain itu, persamaan identitas kultural dalam *nation state* terasa luas cakupannya bila dibandingkan dengan bangsa dalam pengertian satu suku bangsa.

Menurut Hirano Ken'ichiro (1986) ada dua model pembentukan *nation state*. Pertama, model ortodoks yang bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Jadi setelah suatu bangsa (dalam pengertian *nation state*) terbentuk maka suatu rezim politik dirumuskan dan kemudian dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi politik warga negara dalam kehidupan bangsa dan negara. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah suku bangsa.

Kedua model itu berbeda dalam empat hal. Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam pengelompokan masyarakat, model ortodoks tidak mengandung perubahan unsur karena satu bangsa membentuk satu negara. Model mutakhir mengandung perubahan unsur dari banyak kelompok suku bangsa baru. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan. Model ortodoks memerlukan waktu yang singkat sebab hanya membentuk struktur kekuasaan saja (tidak perlu membentuk identitas kultural yang baru). Sedangkan model mutakhir memerlukan waktu yang lama karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural yang baru. Ketiga, kesadaran politik dalam model ortodoks muncul setelah terbentuknya *nation state*, sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik muncul mendahului dan menjadi kondisi awal bagi terbentuknya *nation state*. Keempat derajat pentingmya partisipasi politik dan rezim politik. Dalam model ortodoks, partisipasi politik dan rezim politik dianggap terpisah dari prose integrasi, sedangkan dalam model mutakhir kedua hal itu tak terpisahkan dari proses integrasi nasional.

Kedua model tersebut menggambarkan secara sederhana proses pembentukan *nation state* yang dalam kenyataannya bersifat rumit. Kerumitan utamanya berkaitan dengan kondisi masyarakat yang bersifat majemuk. Berdasarkan hal itu *Weiner* (1966) menyatakan betapa pentingnya integrasi bangsa bagi suatu negara. Adapun yang dimaksudkan *Weiner* dengan integrasi bangsa ialah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dengan kata lain, integrasi bangsa berarti penggabungan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh.

Menurut pengamatan *Geertz*, (1992: 52), kemajemukan masyarakat suatu negara pada dasarnya dapat dibagi menjadi lima pola, yaitu pola kelompok dominan dengan minoritas, pola kelompok sentral dengan beberapa kelompok menengah yang agak menentang, pola tanpa kelompok dominan, pola kelompok budaya

yang seimbang, dan pola berdasarkan pembagian suku bangsa yang terdiri atas berbagai kelompok kecil.

Bagi Weiner (1966), proses integrasi bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran negara. Secara garis besar, Weiner (1966) mengemukakan dua pola kebijakan yang ditempuh oleh negara. Pertama, penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dan mengembangkan semacam "kebudayaan nasional" yang biasanya dirumuskan dari kebudayaan suku bangsa yang dominan. Kebijakan ini disebut asimilasi. Kedua, pembentukan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil. Kebijakan ini disebut kebijakan kesatuan dalam perbedaan yang secara politik ditandai dengan penjumlahan etnis (suku bangsa). Di dalam praktik jarang ada suatu negara yang menerapkan secara murni salah satu dari kedua pola kebijakan tersebut, yang sering terjadi berupa penerapan secara campuran dengan titik berat yang berbeda.

Pembentukan Identitas Suku Bangsa (Etnis)

Identitas menurut Erikson (Marcia, 1993) adalah suatu gagasan atau ide yang muncul tentang siapa dirinya dan bagaimana mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas dimaknai sebagai suatu pengelolaan antara sesuatu yang solid dalam diri seseorang dengan idealisasi kelompok. Menurut Marcia (Oids, 1996) identitas adalah suatu struktur diri yaitu sesuatu yang bersifat internal, konstruksi diri, organisasi dinamik dari dorongan, kemampuan, keyakinan dan sejarah individu. Semakin berkembang struktur ini semakin individu menyadari keunikan dan kesamaannya juga kekuatan dan kelemahannya dengan orang lain. Sebaliknya kurang berkembangnya struktur ini akan membuat individu mengalami kebingungan dalam melihat perbedaan mereka dari orang lain dan mereka semakin mendasarkan diri pada sumber-sumber eksternal untuk mengevaluasi diri sendiri.

Sementara itu kesukuan (etnisitas) menurut Sibutani dan Kwan (Rotheram *Bhorus & Wyche* dalam Archer, 1994: 63) dipahami sebagai identifikasi seseorang dengan kelompok sosial yang besar berdasarkan keturunan atau leluhur, ras, religi, bahasa atau bangsa asli. Etnisitas tidak hanya membentuk nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku maupun perasaan, namun juga mempengaruhi orang lain dalam merespon individu. Koentjaraningrat (1990: 264) menyamakan istilah suku bangsa dengan *ethnic group* (kelompok etnik). Akan tetapi dalam penelitian ini tidak dibedakan antara istilah suku bangsa dengan etnis, kesukubangsaan dan etnisitas. Menurut Berry (Berry dkk, 1992: 294) etnisitas mengandung dua aspek yaitu (a) segi obyektif yang menunjuk pada keturunan atau leluhur yang berasal dari kelompok kultur sebelumnya dan ini mengakibatkan dua hal yang berbeda, menjadi keturunan asli atau bukan asli, (b) segi subyektif meliputi perasaan (*sense*) identitas dan kelekatan (*attachment*) terhadap kelompok, dalam hal ini orang-orang merasa memiliki dan bekerja dalam kelompok serta merasa sebagai anggota kelompok. Atas dasar ini Phinney (1990: 171-183) menyebut identitas etnis sebagai suatu konstruksi yang kompleks yang mencakup komitmen dan perasaan bersama pada suatu kelompok (etnis), evaluasi positif tentang kelompoknya, adanya minat dan pengetahuan tentang kelompok, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dari kelompok. Identitas etnis merupakan sebuah konsepsi diri dari seseorang. Di dalamnya tercakup sejumlah komponen yang menurut Phinney (Organista, 1988: 81-85 meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Etnisitas dan identifikasi diri etnis (*ethnicity and ethnic self-identification*) disebut juga definisi diri atau pelabelan diri yang dalam hal ini menunjuk pada label etnis seperti bahasa, karakter, adat istiadat yang digunakan seseorang untuk dirinya. Di kalangan anak-anak, riset menunjukkan bahwa dalam memberi label diri sendiri, mereka memilih label yang berhubungan dengan etnisitas orangtua mereka. Pada remaja dan orang dewasa, pelabelan itu

lebih bersifat kompleks, sebab di samping ditentukan oleh latar belakang orangtua juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang dirinya secara etnis, (b) Perasaan memiliki (*Sense of belonging*). Perasaan memiliki pada kelompok etnisnya serta dapat pula ditetapkan sebagai perasaan berseberangan dengan kelompok lain, (c) Sikap positif dan negatif terhadap kelompok etnis (*positive and negative attitudes toward one's ethnic Group*). Sikap positif meliputi kebanggaan, kesenangan, kepuasan dan kesukaan terhadap kelompok etnis yang dimilikinya. Ketiadaan sikap positif atau kehadiran sikap negatif tampak dari penolakan, ketidaksenangan, ketidakpuasan, perasaan inferior atau keinginan menyembunyikan identitas kulturenya, dan (d) Keterlibatan etnis (*ethnic involvement*) dan partisipasi sosial dan praktik kultur (*social participation and cultural practiser*). Keterlibatan dalam kehidupan sosial dan praktik-praktik kultur dalam kelompok etnis seseorang merupakan indikator-indikator keterlibatan etnis, yang paling sering dinilai adalah bahasan persahabatan, organisasi sosial, religi, tradisi, tradisi kultur dan politik. Identitas etnis sebagai suatu konsepsi diri terbentuk sebagai hasil dari proses pembentukan kalangan remaja dan pemuda dari etnis mayoritas pada umumnya relatif tidak mengalami kesulitan dalam proses pembuatannya, karena tinggal mengadopsi nilai-nilai kelompok etnis mayoritas, namun proses perkembangan identitas etnis terasa lebih kompleks bagi remaja dan pemuda etnis minoritas. Secara khusus mereka menghadapi pilihan tentang identifikasi diri mereka sendiri, berdasarkan : (1) Sintesis multikultural: mengidentifikasi secara personal dan kompeten dalam berinteraksi secara efektif dengan lebih dari satu kelompok. (2) Kompeten secara multikultural namun berorientasi kepada kelompok etnisnya sendiri. (3) Kompeten secara multikultural namun berorientasi kepada kelompok dominan. (4) Identifikasi etnisnya kuat terhadap etnisnya sendiri atau monokultural. (5) Berafiliasi dan mengadopsi nilai-nilai, sikap, perasaan dan tingkah laku kelompok dominan.

Menurut Marcia (Adelson, 1980: 161), pembentukan identitas etnis tedari berdasarkan proses eksplorasi dan komitmen yang diterapkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan dalam berbagai kehidupan yang utama. Dari proses tersebut, menurut Archer (1994: 3) akan dihasilkan 4 status identitas etnis sebagai berikut: (a) Gerakan Identitas (*Identify Achievement*), menunjuk pada individu yang mengalami proses eksplorasi dan berbagai alternatif yang ada dengan baik. (b) Penundaan (*moratorium*), menunjuk pada individu yang telah mengalami proses eksplorasi akut namun belum sampai pada komitmen. Bila tampak memiliki komitmen, komitmen tersebut belum jelas. (c) Penutupan (*foreclosure*), menunjuk pada individu yang tidak pernah mengalami proses eksplorasi, tetapi memiliki komitmen. Komitmen ini diperoleh bukan melalui proses pencarian atau eksplorasi akan tetapi diperoleh dari orangtua atau orang lain. (d) Difusi Identitas (*identity diffusion*), menunjuk pada individu tidak pernah atau belum mengalami proses eksplorasi identitas, sehingga tidak pernah membuat suatu komitmen.

Adapun status identitas etnis seseorang, di dalam relasi sosial khususnya relasi etnis akan mempengaruhi bagaimana orang lain merespon individu. Ada dua aspek yang mungkin berlangsung dalam relasi sosial, khususnya relasi etnis, yaitu aspek yang menyenangkan (*pleasant aspect*) seperti daya tarik (*attraction*), keintiman (*altruisme*) dan aspek yang tidak menyenangkan (*unpleasant aspect*) seperti prasangka (*prejudice*) dan agresi (*agression*) (Myers, 1996: 387; Betty, dkk, 1992: 299). Dari kerangka model relasi tersebut, pada saat individu atau kelompok memandang individu atau kelompok lain pasti akan timbul kognisi tentang persamaan dan perbedaan di antara mereka. Dalam studi lintas budaya, perbedaan biasanya dipandang sebagai kekurangan (*differences lead to their being viewed as deficiencies*). Suatu evaluasi tentang perbedaan antarkelompok disebut sebagai etnosentrisme (Berry, dkk, 1992: 8; Segail, dkk, 1990: 316).

Tentu saja hubungan antaretnis, terutama di kalangan mahasiswa sebagaimana menjadi fokus penelitian ini perlu diupayakan agar berada dalam aspek yang menyenangkan. Menurut konsorsium W.T Grant dalam Rotheram-Borus & Wyche (dalam Archer, 1994: 77) intervensi paling efektif adalah pendidikan multikultur dengan sekolah sebagai landasan. Untuk itu, langkah tersebut perlu ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas etnis. Faktor-faktor tersebut menurut Rotheram & Whyce (Archer, 1994: 74) adalah sebagai berikut: (1) Kondisi sosial politik, kondisi sosial politik amat berpengaruh terhadap pasang surut kebanggaan dan identitas etnis. Sebagai contoh: di akhir tahun 1960-an dan 1970-an, perubahan sosial dan politik di Amerika Serikat menyebabkan kebanggaan etnis nampak tinggi pada remaja Amerika baik etnis minoritas maupun mayoritas. (2) Keseimbangan etnis dan ketegangan lintas etnis, menurut Weinreich (Rotheram-Borus & Wyche dalam Archer, 1994: 74), etnisitas akan meningkat dalam lingkungan yang mengancam dan menurun dalam konteks yang integratif serta non-konflik. Rotheram-Borus mengemukakan bahwa pada lingkungan yang baik integrasinya, setidaknya 40% anggota etnis minoritas mengidentifikasi diri sebagai bikultur, sehingga akhirnya tidak ditemukan perbedaan etnis yang signifikan. Perbedaan etnis yang signifikan ditemukan di lingkungan yang penuh ketegangan dalam proses pembentukan identitas. (3) Identitas Etnis Keluarga, keluarga-keluarga etnis minoritas bervariasi dalam penerimaan kontak anak-anak remajanya dan juga adopsi terhadap nilai-nilai dan perilaku kelompok etnis dominan. Tingkatan dukungan atau hukuman yang dialami remaja dalam jaringan sosial menjadi penentu kritis dalam mencapai pilihan dan kesempatan. Perbedaan gaya pengasuhan orangtua mempengaruhi pencarian identitas personal remaja. Sebagai contoh, orangtua Asia lebih menuntut kepatuhan dan konformitas pada norma-norma kelompok etnis dibanding orang Eropa (Amerika).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Identitas Nasional dan Identitas Etnik Mahasiswa di asrama-asrama berbasis Suku di Daerah Istimewa Yogyakarta” diperoleh temuan-temuan (1) Kesadaran identitas nasional yang tertanam dalam diri mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum cukup tinggi. (2) Identitas etnis mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku di Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih relatif tinggi. Identitas nasional dan identitas etnis mahasiswa Makasar sedikit lebih tinggi dibanding mahasiswa Riau dan Irian Jaya yang dipengaruhi oleh faktor kebanggaan terhadap heroisitas historis. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan identitas nasional antara lain; kesamaan histories dalam perlawanan terhadap kolonial, sikap kepahlawanan, adanya ancaman secara eksternal. (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan identitas etnik antara lain adanya patriotisme etnis-kedaerahan atau kesukuan, perasaan sepenanggungan dalam perantauan, perhatian pemerintah daerah asal, serta sikap kebersamaan dan menjunjung kegotongroyongan mahasiswa sesama daerah/etnik. (5) Rumusan pemikiran mengatasi konflik etnis antara lain; penyelesaian konflik etnis yang berusaha melibatkan tokoh-tokoh etnis, membangun penyelesaian dari basis masyarakat (*bottom up*), serta memperhatikan dan memberi ruang gerak atas perbedaan-perbedaan antar pihak-pihak yang terlibat konflik.

SIMPULAN

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran identitas nasional yang tertanam dalam diri mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum cukup tinggi.
2. Identitas etnis mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa berbasis suku di Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih relatif tinggi. Identitas nasional dan identitas etnis mahasiswa

Makasar sedikit lebih tinggi dibanding mahasiswa Riau dan Irian Jaya yang dipengaruhi oleh faktor kebanggaan terhadap heroisitas historis.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan identitas nasional antara lain; kesamaan histories dalam perlawanan terhadap kolonial, sikap kepahlawanan, adanya ancaman secara eksternal.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan identitas etnik antara lain adanya patriotisme etnis-kedaerahan atau kesukuan, perasaan sepenanggungan dalam perantauan, perhatian pemerintah daerah asal, serta sikap kebersamaan dan menjunjung kegotongroyongan mahasiswa sesama daerah/etnis.
5. Rumusan pemikiran mengatasi konflik etnis antara lain; penyelesaian konflik etnis yang berusaha melibatkan tokoh-tokoh etnis, membangun penyelesaian dari basis masyarakat (*bottom up*), serta memperhatikan dan memberi ruang gerak atas perbedaan-perbedaan antar pihak-pihak yang terlibat konflik.

Sedangkan saran yang diberikan lebih difokuskan pada upaya perumusan pemikiran mengatasi konflik-konflik yang ber-nuansa etnis yang dilakukan oleh berbagai pihak di masa-masa yang akan datang agar kebijakan yang dirumuskan dapat lebih efektif dan bukan justru menimbulkan konflik baru maka perlu:

1. Melibatkan dan menempatkan berbagai pihak yang berkonflik pada posisi yang sejajar dalam perumusan dan proses kebijakan penyelesaian konflik.
2. Membangun rumusan kebijakan penyelesaian konflik yang berakar dari bawah (*bottom up*).
3. Kebijakan untuk penyelesaian konflik dengan mentradisikan pemberian akses terhadap perbedaan bukan justru membuat penyeragaman yang justru menciptakan bibit ketidakpuasan antar etnis, suku, atau daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelson, J (ed). (1980). *Hand Book of Adolescent Psychology*. New York- John Willey & Sons Inc
- Anderson, Benedict. (1991). *Imagined Communities Reflection on The Origin and Spread of Nationalism*. London and New York: Verso
- Archer, Sally. L. (1983). *Interventions for Identity Development*. California: SAGE Publication Inc
- Faisal, Sanapiah. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial. Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: CV. Rajawali
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Teori Antropologi*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Marcia, J. E (et.al). (1993). *Ego Identity. A Hand Book for Psychological Research*. New York: Springer Verlag
- McClosky, Herbert & John Zaller. (1988). *Ethos Amerika Sikap Masyarakat terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy. J. (2001). *Metodologi Penelelitian Kualitatif*. Cetakan ke-14. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Myers, David G. (1996). *Social Psychology*. New York: The MC Graw-Hill Companies Inc
- Organista, P.Ball. (1998). *Reading in Ethnic Psychology*. New York: Routledge
- Rotheram, Boruss H.J & Whyche, Karen F. (1994). *Ethnic Differences in Identity Development in The United States* dalam Archer S.L. (1994). *Intervension for Identity Development*. California: SAGE Publication Inc

Identitas Nasional dan Identitas Etnis Mahasiswa di Asrama Berbasis Kesukuan di Indonesia (Suharno)

Skinner, G. William (ed). (1995). *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University, Cultural Report, South East Studies

Suharsimi Arikunto. (1983). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara

Umar Kayam. (1989). *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*. Dimuat dalam majalah Horison No. 11 Tahun XXIV.